

## **Implementasi Program Unit Reaksi Cepat (URC) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba**

### **Implementation of the Rapid Response Unit (RRC) Program in Overcoming Poverty in Bulukumba District**

**Annisa Awaliyah, Andi Aslinda, Muhammad Guntur**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Makassar

Email : [annisaawaliyah3130@gmail.com](mailto:annisaawaliyah3130@gmail.com), [aslinda@unm.ac.id](mailto:aslinda@unm.ac.id)  
[hmguntur13unm@yahoo.com](mailto:hmguntur13unm@yahoo.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Unit Reaksi Cepat (URC) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melihat sejauh mana implementasi program tersebut kepada masyarakat melalui 4 indikator dari Edward III yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Implementasi Program Unit Reaksi Cepat (URC) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bulukumba. menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajiandata, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Unit Reaksi Cepat (URC) di Kabupaten Bulukumba dilihat dari empat kriteria Implementasi kebijakan Edward III yaitu: 1) komunikasi 2) sumber daya 3) disposisi 4) struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian 3 Indikator dari implementasi belum berjalan dengan baik yaitu komunikasi, sumber daya , dan disposisi, dan satu Indikator yang bisadikatakan berjalan dengan baik yaitu indikator Struktur Birokrasi, sehingga dilihat dari Indikator tersebut program URC belum berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Program, Unit Reaksi Cepat (URC)*

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine how the Implementation of the Rapid Response Unit (URC) Program in Overcoming Poverty in Bulukumba Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. By looking at the extent of the implementation of the program to the community through 4 indicators from Edward III, namely: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This study aims to find out about how to implement the Rapid Response Unit (RRC) Program in Overcoming Poverty in Bulukumba Regency. used a descriptive qualitative research and data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. The data analysis technique used consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the implementation of the Rapid Response Unit (RRC) Program in Bulukumba Regency was seen from the four criteria for implementing Edward III's policies,*

*namely: 1) communication 2) resources 3) disposition 4) bureaucratic structure. Based on the results of the study, 3 indicators of implementation have not gone well, namely communication, resources, and disposition, and one indicator that can be said to be running well is the Bureaucratic Structure indicator, so that judging from these indicators the RRC program has not run optimally.*

**Keywords:** *Implementation; Program; Rapid Response Unit (RRC)*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Marwanti dan Astuti, 2012; Azizah, Sudarti dan Kusuma, 2018). Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Ulvia, Yefriza dan Mintargo, 2018).

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Untuk itu pemerintah memiliki

peranan penting dalam mengimplementasi kebijakan guna menanggulangi kemiskinan yang ada.

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya (Aneta, 2012; Maifizar, 2018). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan nyata, serta substansinya hanya administratif (Sadhana, 2011).

Dalam literatur banyak mendefinisikan kemiskinan, namun pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga pengertian kemiskinan antara lain; kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural (Nursalam, 2012). Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan (Lalaun dan Siahaya, 2016). Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya (Mulia dan Saputra, 2020). Sedangkan miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya (Maridjo, Mudayen dan Lantum, 2013). Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Jumlah penduduk miskin justru semakin meningkat dari tahun ketahun, kondisi ini cukup merisaukan sehingga penting untuk diatasi oleh pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengurangi penduduk miskin, Dengan memberikan berbagai program-program yang ada, baik dari program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan usaha kecil.

Pada daerah kabupaten Bulukumba yang jumlah persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 7,10 persen atau menurun dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,16 persen poin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada Maret 2020 sebesar 30,00 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 0,49 ribu

jiwa dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 30,49 ribu jiwa. Secara umum selama 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami penurunan baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk miskin.

Penduduk miskin juga penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2020, garis kemiskinan meningkat sebesar 6,37 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp330.161,- perkapita per bulan menjadi Rp351.180,- perkapita per bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba selalu mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp274.318,- perkapita per bulan atau meningkat Rp76.682,- perkapita per bulan dalam periode 5 tahun.

Kemiskinan tidak hanya cukup dilihat melalui jumlah dan persentase penduduk miskin, selain itu perlu memperhatikan tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan (Dewanty, Hak dan Idwal, 2020). Pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Bulukumba meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin dari 0,60 pada Maret 2019 menjadi 0,71 pada kondisi Maret 2020. Kondisi serupa terjadi pada

Indeks Keparahan Kemiskinan yang meningkat 0,05 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,09 menjadi 0,14 pada Maret 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin lebar dibandingkan periode sebelumnya.

Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan (Amin dan Amri, 2011).

Maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba membuat program penanggulangan kemiskinan yaitu program pengaduan Unit Reaksi Cepat (URC) sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang di kategorikan miskin agar mampu meningkatkan perekonomiannya dan menjadikan kabupaten Bulukumba menjadi daerah yang sejahtera. Peluncuran program yang dilakukan oleh Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berlangsung di Kantor Dinas Sosial, Jl. Srikaya Bulukumba, Selasa 27 November 2018. Dalam peningkatan

kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin adalah suatu prioritas pemerintah daerah. Hanya saja, kendala saat ini bahwa penanganannya berbasis data terpadu yang menjadi rujukan sumber data utama dalam penanganan fakir miskin belum terupdate sejak 2015. Di bentuknya URC untuk mewujudkan keterpaduan sistem penanganan masalah sosial warga miskin antar lintas OPD dan pilar sosial. Masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan program perlindungan sosial. Secara signifikan pula mengakibatkan banyaknya masalah sosial fakir miskin yang muncul dipermukaan dan tidak terselesaikan dengan baik dan sistematis.

Dan juga bantuan warga miskin masih tumpang tindih di beberapa OPD yang menyebabkan pemberian bantuan belum sepenuhnya optimal. Warga miskin juga tidak memiliki kanal pengaduan resmi yang menjamin permasalahan mereka tersampaikan dengan baik kepada pemerintah. Sementara warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial yang cepat dan efektif dan sesuai yang mereka butuhkan. Karena itu dibutuhkan suatu sistem kerja terpadu dimana pemerintah hadir lebih dekat, lebih cepat, dan tanggap dalam penanganan masalah sosial kemanusiaan. URC ini hadir sebagai *first response*, dan untuk mewujudkan keterpaduan sistem penanganan masalah sosial wargamiskin antar lintas OPD, pilar

sosial, dalam penanganan masalah sosial. Juga mewujudkan kolaborasi dan komitmen bersama antar komunitas sosial, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di daerah bertajuk Butta Panrita lopi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asna Aneta dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, dimana dalam penelitian ini lebih fokus kepada penerapan program P2KP untuk mengatasi kemiskinan di Kota Gorontalo, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Kemudian ditambahkan referensi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nano Prawoto dengan judul penelitian Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya, penelitian ini menggambarkan tentang strategi terkait program yang di keluarkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan juga berbagai referensi tentang arti kemiskinan itu sendiri.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian saat ini, terletak pada lokus penelitian dan program penanggulangan kemiskinannya yang diharapkan mampu menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul

“Implementasi Program Unit Reaksi Cepat (URC) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2017).

Deskripsi fokus penelitian Implementasi Program Unit Reaksi Cepat Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

### **1) Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

### **2) Sumber daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya

finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

### 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang disebut *standard operating procedures* atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### 1) Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Dari hasil analisis terkait program URC masih belum maksimal dilaksanakan karena terbukti selama program tersebut berjalan salah satu LSM yang ada di kabupaten bulukumba yaitu Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) yang sifatnya mengawasi tidak begitu mengetahui bahwasanya program tersebut sudah dibentuk, mereka hanya mengetahui pada saat program tersebut sudah berjalan dan pada saat melakukan

pendataan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan juga komunikasi antara ketua TKPKD dengan Dinas Sosial yang juga tidak maksimal karena sampai saat ini Ketua TKPKD yang pada saat ini adalah mantan wakil bupati Bulukumba yang mengira bahwasanya program tersebut masih berjalan sampai saat ini namun ironisnya program tersebut terhenti karena sesuatu hal yang menjadi tanda tanya besar mengapa program tersebut terhenti, padahal program tersebut bisa dikatakan menjadi alat komunikasi masyarakat desa yang jauh dari perkotaan sehingga jika membutuhkan sesuatu bisa segera dilaporkan ke tim URC yang disediakan di setiap kecamatan.

## **2) Sumber daya**

Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber dayafinansial.

Dari hasil analisa peneliti bahwa dalam segi sumber dayadalam halnya sumber daya manusia dalam program ini sudah cukup bagus karena terbukti pada saat menjalankan tugasnya dalam pemberian bantuan sudah sesuai yang diharapkan namun berbicara tentang sumber daya anggaran yangada jika anggaran yang

diberikan tidak maksimal maka proses pelayanan kepada masyarakat juga tidak maksimal karena di akibatkan oleh anggaran, begitupun dengan program URC ini mengalami kendala akibat anggaran yang tidak ada sehingga memperlambat proses pelayanan program tersebut kepada masyarakat.

## **3) Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana programatas kebijakan, khususnya para pelaksanaan yang menjadi implemntator dari program. Dalam hal ini terutama aparatur birokrasi. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya hanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar dalam implementasi kebijakan yang akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap satu implementasi kebijakan karenakonflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap dari pelaksana program URC juga bisa dikatakan paa saat itu sangat mendukung terbukti bahwa selama proses berlangsungnya kegiatan adanya dukungan para pemangku kebijakan yang diharapkan bahwa program ini dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang namun tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa program tersebut terhenti. Dilihat dari sikap pelaksana

program dalam menangani permasalahan masyarakat pada saat itu bisa dikatakan baik namun berbicara tentang komitmen dalam mempertahankan program tersebut masih kurang dimiliki oleh para pelaku pelaksana sehingga program URC tidak terlaksana dengan maksimal.

#### **4) Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari “atas” ke “bawah”.

Dalam menjalankan suatu program pastinya harus mempunyai SOP tersendiri agar program yang dijalankan dapat terarah dengan baik sesuai dengan SOPnya karena jika tidak mempunyai SOP maka apa yang dijalankan tidak akan sesuai yang diharapkan, namun dalam menunjang proses tersebut memerlukan kesigapan dan kesiapan oleh para pelaku pelaksana itu sendiri.

Dalam program URC juga mempunyai struktur birokrasinya tersendiri baik dari SOP, prosedur pelaksana dll dalam menjalankan sebuah program karena jika tidak mempunyai SOP tersendiri maka program tersebut tidak bisa terlaksana, SOP yang ada dalam program ini layak dijalani dengan baik bagi para pelaku pelaksana agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa program tersebut belum optimal dan dilihat dari beberapa variabel menurut Edward III bisa disimpulkan sebagai berikut:

##### **1) Komunikasi**

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa komunikasi yang ada terkait program tersebut tidak berjalan dengan baik terbukti dari mulai dibentuknya program salah satu LSM yang ada di bulukumba tidak mengetahui terkait program tersebut, dan juga miskomunikasi antara staf dinas sosial dengan ketua TKPKD sehingga bisa dikatakan program tersebut belum optimal.

##### **2) Sumber Daya**

Sumber daya yang ada pada URC dari segi sumber daya manusia cukup baik pada saat itu karena terbukti terbantunya salah satu masyarakat yang ada di Desa Salassae berkat kerja sama antara staf dan dinas yang bersangkutan, sedangkan dari segi



anggarannya dari hasil survei bahwasanya yang menjadi kendala program URC ini salah satunya yaitu terkait anggaran yang tidak memadai serta ketua fakir miskin perkotaan dan pedesaan telah dipindahkan sehingga memperlambat proses pengimplementasian program tersebut.

3) Disposisi

Sikap para pelaku pelaksana pada saat menjalankan program pada saat itu sangat mendukung yang diharapkan bahwa program ini dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama, namun tidak sesuai dengan harapan bahwasanya program mengalami hambatan dan akhirnya terhenti untuk sementara, dari analisis penulis program ini terhenti karena kurangnya komitmen dari para pelaku pelaksana program sehingga program tersebut mengalami hambatan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi program URC pada saat itu sudah baik dilihat dari struktur, bahwa program tersebut memiliki struktur organisasi dan SOP nya tersendiri sehingga bisa terarah dalam menjalankan program tersebut.

b. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut dapat direkomendasikan saran terkait implementasi program URC dalam mengatasi kemiskinan yaitu :

- 1) Perlu adanya komunikasi yang baik sesama pelaku kebijakan agar tidak terjadi miskomunikasi dan dalam menjalankan suatu program bisa mendapatkan hasil yang

diinginkan.

- 2) Sebagai Ketua Tim TKPKD sebaiknya lebih aktif dalam mengkoordinir para pelaksana program agar dijalankan dengan baik.
- 3) Diperlukan sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tidak cuek dalam program tersebut. Dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji pokok permasalahan yang sama diharapkan menggunakan teori yang berbeda agar hasil yang didapatkan lebih luas dan lebih baik dari peneliti sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, S., & Amri, N. (2011). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makassar. *Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin*, 1–2.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54–65.
- Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 167–180.
- Dewanty, W., Hak, N., & Idwal, B.

- (2020). Program Gerobak Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Bengkulu. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 1(3), 1–7.
- Lalaun, A., & Siahaya, A. (2016). Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 73–78.
- Maifizar, A. (2018). Karakteristik dan Fenomena Kemiskinan Keluarga Miskin Pedesaan di Aceh. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 2(3).
- Maridjo, H., Mudayen, Y. M. V, & Lantum, A. K. (2013). Analisis Tingkat Kemiskinan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1), 57–73.
- Marwanti, S., & Astuti, I. D. (2012). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 9(1).
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83.
- Nursalam, A. N. (2012). Tipologi Kemiskinan di Kota Makassar. *Jurnal. Universitas Hasanuddin*.
- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D (Ke-3)*. Alfabeta.
- Ulvia, S., Yefriza, Y., & Mintargo, M. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu*. Universitas Bengkulu.

### **Perundangan**

- Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

### **Internet**

- <http://bulukumbakab.bps.go.id>